

Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan pada Gereja Toraja ABC

Marselinus Aditya Hartanto Tjungadi¹. Yan Rahadian²

Program Studi S2 Magister Akuntansi, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
Jalan Salamba Raya No. 4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430

Abstract. This research aims to evaluate accountability and internal control of financial reporting on ABC Toraja Church. The method used in this research is qualitative descriptive that uses case study approach with *single case unit analysis*. The results of the research show that the stages in assessing financial reporting accountability at church have not run optimally. The internal control also has not run well, especially Church financial administrators is not competent, segregation of duties that have not fully good, and application of general guidance have not run optimally, especially Church financial administrators is not competent, segregation of duties that have not fully good, and application of general guidance have not run optimally. The lack of understanding of Church financial administrators also understood by the church members. For the unit of analysis, it is suggested that the contents of the General Guidelines for Financial Management and Property of the Toraja Church be improved and increase outreach to financial administrators and church councils. Researcher recommends using an accounting application, compiling a chart of accounts, recruiting specialized staff as financial or accounting employees, and using key performance index to measure the performance of those staff.

Keywords: *Accountability Theory; Financial Reporting Accountability; Internal Control; Stewardship Theory; Torajanese Church.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas dan pengendalian internal pelaporan keuangan Gereja Toraja ABC. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada *single case unit analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan dalam pelaksanaan akuntabilitas pelaporan keuangan gereja belum berjalan dengan optimal. Pengendalian internal pun belum berjalan dengan baik, terutama pengurus keuangan gereja yang kurang kompeten, pemisahan tugas yang belum sepenuhnya baik, dan penerapan pedoman umum yang belum optimal. Kurangnya pemahaman para pengurus keuangan juga dimaklumi oleh jemaat, sehingga menerima saja keadaan tersebut. Bagi unit analisis disarankan agar isi dari Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Harta Milik Gereja Toraja diperbaiki dan meningkatkan sosialisasi kepada para pengurus keuangan dan majelis jemaat. Sebaiknya menggunakan aplikasi akuntansi, menyusun bagan akun, merekrut staf khusus sebagai pegawai keuangan atau akuntansi, dan menggunakan metode penilaian kinerja untuk mengukur kinerja staf tersebut.

Kata Kunci: Akuntabilitas Pelaporan Keuangan; Gereja Toraja; Pengendalian Internal; Teori Akuntabilitas; Teori Stewardship

Corresponding author. marselinusaditya8@gmail.com; yan.rahadian@yahoo.com

How to cite this article. Tjungadi, Marselinus A. H. dan Rahadian, Yan. (2020). Akuntabilitas dan Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan Pada Gereja Toraja ABC. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia, 12 (2), 241-264. Retrieved from <https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/view/24583>

History of article. Received: Mei 2020, Revision: November 2020, Published: Desember 2020

Online ISSN: 2541-0342. Print ISSN: 2086-2563. DOI : <https://doi.org/10.17509/jaset.v12i2.24583>

Copyright©2020. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Program Studi Akuntansi FPEB UPI

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, perhatian terhadap organisasi nirlaba semakin tinggi karena perkembangan peran dan kontribusi mereka dalam masyarakat. Dengan meningkatnya harapan pada organisasi nirlaba, maka para pemangku kepentingan menuntut agar sumber daya digunakan secara

efisien dan efektif. Oleh karena itu, organisasi nirlaba diharapkan bertanggung jawab atas sumber daya melalui pelaksanaan akuntabilitas dan pengendalian internal.

Tiap kategori organisasi nirlaba memiliki keunikan, sehingga masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda. Salah

satu kategorinya adalah organisasi nirlaba keagamaan. Dibandingkan kategori organisasi lainnya, organisasi nirlaba keagamaan tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama makhluk hidup lainnya, terutama manusia, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Oleh karena itu, menarik untuk meneliti akuntabilitas dan pengendalian internal pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba keagamaan.

Beberapa tahun terakhir telah terjadi beberapa kasus penyelewengan dana dalam organisasi nirlaba keagamaan. Yang pertama, seorang bendahara Gereja *City Harvest* di Singapura bernama Chew Eng Han beserta lima petinggi gereja lainnya (termasuk dua pendeta gereja tersebut) dinyatakan bersalah karena menggelapkan dana sebesar SGD 50 juta pada tahun 2015 (bbc.com, 2018). Kemudian, seorang Kelian bernama I Made Redi, dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun penjara, pidana denda sebesar Rp 50 juta subsidi tiga bulan kurungan. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 116.453.000 karena telah menyelewengkan dana hibah renovasi Pura Dalem Kebon, Banjar Bedauh, Desa Carangsari, Petang, Badung, Bali yang merugikan negara sebesar Rp 116.453.000 (Jawapos.com, 2019). Selanjutnya, seorang Takmir Masjid Al-Ghuroba, Pakuwon Mall Surabaya bernama Subiyanto divonis hukuman 2,5 tahun penjara atas kasus penggelapan dana infaq sebesar Rp 266,4 juta selama Maret 2014 hingga Maret 2017 (Kumparan.com, 2018).

Beberapa kasus penyelewengan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan pelaksanaan akuntabilitas dan pengendalian internal dalam organisasi nirlaba keagamaan. Gereja merupakan salah satu organisasi keagamaan untuk pelaksanaan peribadatan yang tergolong sebagai organisasi nirlaba. Gereja dapat menjalankan kegiatannya karena adanya sumber daya yang dikelolanya, terutama yang berasal dari anggotanya (jemaat), serta sumbangan sukarela dari masyarakat umum. Menurut (Jeffrey, 2008), penerapan pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan dapat

meningkatkan kepercayaan penyumbang terhadap organisasi nirlaba.

Menurut (Laughlin, 1998), dalam pengelolaan sumber daya Gereja, terdapat dikotomi atau kontras antara hal sakral (rohani) yaitu sistem kepercayaan dalam Gereja, dengan hal sekuler (duniawi) yaitu peran akuntansi. Pandangan ini telah mempengaruhi pemikiran para jemaat sehingga menganggap penerapan akuntansi tidak diperlukan dalam pengelolaan keuangan Gereja. *Interview* awal dengan beberapa jemaat mengkonfirmasi adanya permasalahan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di gereja. Permasalahan tersebut terkait dengan penyajian informasi keuangan mengenai laporan penyumbang, seperti nama dan jumlah yang disumbangkan. Jemaat pada umumnya enggan jika nama dan jumlah sumbangan mereka dipublikasikan, antara lain karena merasa malu jika sumbangan terlalu kecil atau tidak mau terjebak dalam kesombongan rohani. Selain itu, jemaat pada umumnya percaya bahwa pengurus gereja terutama bendahara tidak akan menyalahgunakan dana gereja terutama karena dalam menjalankan tugasnya sebagai bendahara merupakan bentuk pelayanan kepada Tuhan dan jemaat.

Bigoni, Gagliardo, dan Funnell (2013) menemukan bukti bahwa praktik akuntansi tidak terikat dengan peningkatan keuangan paroki. Akuntansi tidak dianggap sebagai alat untuk meningkatkan sumber daya yang tersedia dalam gereja. Akuntansi dianggap sebagai sarana untuk melengkapi nilai-nilai sakral yang mendasari reformasi gereja yang dicanangkan oleh Paus Eugenius IV pada abad ke-15 terutama dalam hal akuntabilitas. Praktik akuntansi di gereja sebagai tindakan yang selaras dengan ajaran iman, terutama karena dana gereja diperuntukkan untuk kemuliaan Allah. Oleh karena itu, pelaksanaan akuntabilitas dan penerapan pengendalian internal pada organisasi gereja sangat diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan akuntabilitas

pengelolaan keuangan dan pengendalian internal pada salah satu gereja, yaitu Gereja Toraja ABC. Gereja Toraja ABC dipilih sebagai objek penelitian karena beberapa alasan. Alasan pertama, dari hasil wawancara awal dengan beberapa jemaat Gereja Toraja ABC, diketahui bahwa terjadi selisih atas jumlah dana dari rekapan penerimaan dan pengeluaran uang yang diterima Gereja. Selain itu, kode penyumbang tidak diinformasikan padahal dana sudah diberikan oleh penyumbang. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada isu akuntabilitas dan pengendalian internal di Gereja Toraja ABC. Alasan kedua, otoritas Gereja Toraja ABC memberikan izin pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian terhadap organisasi gereja di Indonesia masih relatif kurang, karena tidak semua lembaga keagamaan seperti gereja memberi izin dan terbuka untuk diteliti.

Beberapa penelitian serupa telah dilakukan sebelumnya. Penelitian Ginting, (2014) menunjukkan akuntabilitas di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Perumas Simalingskir Medan belum diterapkan secara menyeluruh, terutama terkait dana pemasukan. Terdapat kelebihan dana yang dikeluarkan pada pos-pos tertentu dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran belum disusun dan direncanakan secara memadai serta belum disosialisasikan kepada Jemaat secara baik. Sebelumnya, Duncan, Flesher, & Stocks (1999) melakukan penelitian tentang pengaruh ukuran gereja (berdasarkan jumlah jemaat) dan denominasi terhadap sistem pengendalian internal. Hasil penelitian menunjukkan semakin besar ukuran gereja (berdasarkan jumlah jemaat) memiliki korelasi dengan pengendalian internal yang lebih memadai. Hal ini dikarenakan adanya pembagian tugas yang lebih baik dalam struktur kepengurusan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Raya (2017) mengevaluasi implementasi pelaporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas di Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga. Hasilnya menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai

dengan standar pelaporan keuangan Keuskupan Agung Semarang dan PSAK nomor 45 revisi tahun 2011. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam penyesuaian dan cara pencatatan yang disesuaikan dengan karakteristik paroki.

Penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas gereja di atas berfokus pada kesesuaian penyajian informasi keuangan dengan pedoman. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas Bovens (2007) sebagai model yang menjelaskan tahapan-tahapan yang perlu dilaksanakan antara aktor dan forum dalam pelaksanaan akuntabilitas. Penggunaan model ini diharapkan dapat menggambarkan proses pelaksanaan akuntabilitas pelaporan keuangan dengan lebih baik dibandingkan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga menggunakan sudut pandang yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengevaluasi penerapan pengendalian internal pelaporan keuangan berdasarkan kerangka kerja *Internal Control – Integrated Framework (IC-IF)* yang dikeluarkan oleh *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* tahun 2013. Selain itu, berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya fokus pada salah satu isu, penelitian ini menggabungkan isu akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian internal. Penggabungan kedua isu tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pengelolaan keuangan gereja yang lebih jelas sehingga penyusunan dan pertanggungjawaban keuangan gereja menjadi lebih baik.

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas dan pengendalian internal pelaporan keuangan Gereja Toraja ABC. Harapannya, penelitian ini mampu mempersembahkan kontribusi berupa evaluasi proses akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian internal serta memberikan rekomendasi peningkatan akuntabilitas dan pengendalian internal di Gereja. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu praktik

pelaksanaan akuntabilitas yang sejalan dengan tujuan utama pembentukan Gereja, yaitu membawa anggotanya pada keselamatan yang kekal.

KAJIAN LITERATUR

Diagram Alir (*Flowchart*)

Romney dan Steinbart (2017) menjelaskan bahwa *flowchart* merupakan teknik analitis melalui ilustrasi berupa gambar untuk mendeskripsikan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Diagram alir menggambarkan bagaimana proses bisnis dilaksanakan dan bagaimana aliran dokumen dalam organisasi. Pada penelitian ini, kategori *flowchart* yang digunakan adalah *document flowchart*. Romney dan Steinbart (2017) menjelaskan bahwa *document flowchart* dikembangkan untuk mengilustrasikan aliran atau arus data dan dokumen yang terjadi di antara bagian atau area dalam suatu organisasi. *Document flowchart* menelusuri dokumen dari awal hingga akhir, menunjukkan dari mana asalnya setiap dokumen, bagaimana distribusinya, tujuan penempatannya, dan segala sesuatu yang terjadi saat dokumen mengalir melalui sistem. Penelitian ini menggunakan *document flowchart* untuk menggambarkan alur prosedur penerimaan kas (*revenue cycle*) dan pengeluaran kas (*expenditure cycle*) pada Gereja Toraja ABC.

Accountability Theory

Bovens (2007) menjelaskan akuntabilitas sebagai hubungan antara aktor dengan forum. Aktor berkewajiban untuk memaparkan dan mengklarifikasi tindakannya. Forum dapat mempertanyakan dan menilai langkah dan tindakan yang dilaksanakan oleh aktor, sehingga aktor harus siap menghadapi konsekuensinya. Akuntabilitas diterapkan untuk memenuhi syarat atas keadaan atau kinerja dari aktor. Akuntabilitas bermakna sifat “responsif” dan “rasa tanggung jawab” yang secara sederhana menunjukkan kemauan untuk bertindak secara transparan dan adil. Aktor sebagai pihak yang memberi

pertanggungjawaban dapat merupakan seseorang (individu tertentu) maupun sebuah organisasi, seperti pejabat organisasi atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Forum sebagai pihak yang meminta pertanggungjawaban dapat merupakan seseorang (individu tertentu), seperti jurnalis, kantor audit, maupun merupakan masyarakat umum. Berikut ini merupakan tiga tahapan penting dalam pelaksanaan akuntabilitas yang memaparkan hubungan antara aktor dan forum, yaitu:

a. Tahap pertama (*Informing about conduct*)

Aktor menginformasikan dan memaparkan hasil kerjanya atau pemberian laporan tentang hasil yang telah dicapainya kepada forum. Dalam hal ini, aktor menerbitkan laporan evaluasi diri (atas hasil kerjanya) dan laporan tahunan serta memberikan penjelasan lisan mengenai hasil kerjanya (Brandsma and Schillemans, 2012). Laporan tersebut dapat berupa laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, atau laporan kinerja. Laporan tersebut dapat menggunakan media virtual contohnya melalui *website*, maupun media cetak. Pertanyaan yang diajukan pada tahap ini adalah “Apakah aktor telah menyediakan informasi mengenai tindakan atau langkah yang diambilnya secara tepat waktu?”, “Apakah informasi tersebut dapat diandalkan?”, dan/atau “Apakah informasi yang diberikan sudah cukup memadai?”

b. Tahapan kedua (*debating*)

Forum menginterogasi dan membahas laporan yang telah dibuat oleh aktor. Hal ini untuk memeriksa apakah laporan yang disusun cukup akuntabel. Umumnya, tahapan kedua ini punya proses yang paling panjang karena tahap *debating* ini menuntut penjelasan aktor akan hasil kerja dan alasan yang mendasari tindakannya dalam membuat

laporan seperti yang dipertanggungjawabkan tersebut. Pertanyaan yang diajukan pada tahap ini adalah “Apakah forum diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan?”, “Apakah kedua pihak berusaha saling mendengarkan?”, dan/atau “Apakah aktor diberikan kesempatan untuk menjelaskan tindakannya dalam penyusunan laporan?”

c. Tahapan ketiga (*judging*)

Forum menilai laporan yang sudah dipertanggungjawabkan oleh aktor. *Output* dari penilaian dapat berupa persetujuan maupun pemberian sanksi. Pemberian sanksi dapat bersifat formal, seperti denda atau hukuman, maupun bersifat informal, seperti meminta aktor untuk mengakui kesalahan atau kelalaiannya di hadapan media massa, seperti televisi atau surat kabar sehingga secara tidak langsung mencoreng nama baik dan karirnya. Pertanyaan yang dapat diajukan pada tahap ini adalah “Apakah forum bersifat independen dan bebas dari bias?”, “Apakah standar yang digunakan untuk menyusun laporan jelas”, dan/atau “Apakah konsekuensi yang ditimbulkan telah sesuai?”.

Brandsma dan Schillemans, (2012) menjelaskan mengenai akuntabilitas dalam sebuah dimensi kubus. Dimensi pertama adalah jumlah informasi yang disampaikan dan tersedia. Semakin banyak dan mudah informasi yang tersedia maka akuntabilitas semakin tinggi. Dimensi kedua adalah intensitas diskusi pertemuan antara aktor (bendahara) dan forum (jemaat Gereja). Semakin intens pertemuan diskusinya maka semakin akuntabel. Dimensi ketiga adalah konsekuensi dari keputusan yang diambil oleh bendahara selaku aktor. Semakin besar konsekuensinya maka semakin tinggi akuntabilitasnya. Dengan demikian, maka

tingkat akuntabilitas dapat meningkat jika komunikasi antara aktor dan forum yang melibatkan ketiga dimensi kubus juga ditingkatkan, agar terbangun kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam pelaporan keuangan.

Tiga tahapan akuntabilitas Bovens (2007), daftar pertanyaan dari tiap tahapan, dan aspek dalam ketiga dimensi *accountability cube* Brandsma dan Schillemans (2012) digunakan sebagai pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan akuntabilitas pelaporan keuangan di Gereja Toraja ABC. Melalui hasil evaluasi berdasarkan berbagai pedoman tersebut, maka akan diperoleh gambaran yang jelas atas pelaksanaan akuntabilitas pelaporan keuangan oleh aktor (bendahara) kepada forum (jemaat)

Internal Control

Akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh pengendalian internal yang baik. Romney dan Steinbart (2017) menjelaskan bahwa pengendalian internal adalah penerapan proses untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian dapat tercapai. Hal ini membantu organisasi agar dapat mencapai tujuan dengan lebih baik. Tujuan pengendalian tersebut adalah sebagai berikut:

- Melindungi aset (*safeguard assets*), menghindari atau mendeteksi akuisisi, penggunaan, dan disposisi yang tidak sah.
- Menyimpan catatan aset perusahaan secara detail sehingga dapat menghasilkan laporan yang wajar dan akurat.
- Menyediakan informasi yang akurat dan *reliable*.
- Memastikan laporan keuangan yang disiapkan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- Mengembangkan dan mengefisiensikan operasional.
- Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kebijakan manajerial.

- Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian internal dapat diartikan sebagai sebuah proses serta prosedur yang mencakup kegiatan operasional, serta menjadi bagian terpadu dari kegiatan manajemen. Akan tetapi, pengendalian internal ini tidaklah mudah untuk diterapkan. Sistem pengendalian internal yang efektif tidak dimiliki oleh semua organisasi. Pengendalian internal yang tidak efektif rentan atas kesalahan, *management overrates*, kolusi, serta bisa memberikan penilaian dan pengambilan keputusan yang salah. Selain itu, pengembangan sistem pengendalian internal dalam teknologi informasi (TI) juga memiliki risiko tersendiri (Romney and Steinbart, 2017).

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) (2013) menjelaskan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan pihak lainnya, yang dibuat untuk memberikan tingkat keyakinan yang memadai terkait pencapaian tujuan dari sisi operasional, pembuatan laporan, dan kepatuhan. Kerangka kerja COSO IC-IF (*Internal Control Integrated Framework*) merupakan kerangka pengendalian internal yang digunakan dalam kebijakan dan peraturan untuk mengendalikan aktivitas bisnis pada sebuah perusahaan serta merupakan kerangka yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan tersebut (Romney dan Steinbart, 2017).

Terdapat lima komponen di dalam kerangka kerja pengendalian internal ini menurut COSO (2013), yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan serangkaian standar, proses, dan struktur mengenai integritas dan nilai etik yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian internal di dalam perusahaan. Lingkungan pengendalian ini memberikan dampak yang luas terhadap sistem

pengendalian internal perusahaan. Asas-asas yang melambangkan komponen lingkungan pengendalian adalah sebagai berikut:

- Komitmen terhadap integritas dan nilai etik.
- Pengembangan dan kinerja pengendalian internal diawasi oleh dewan pengawas.
- Struktur, pelaporan, dan otoritas serta tanggung jawab yang sesuai dalam mencapai tujuan yang dibuat oleh manajemen dengan pengawasan dari direksi.
- Komitmen untuk melaksanakan, mengembangkan, serta mempertahankan jiwa kompeten dalam menyalurkan tujuan.
- Mempertahankan tanggung jawab individu untuk tanggung jawab pengendalian internal dalam mencapai tujuan.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko merupakan proses yang dinamis dan terus-menerus dalam mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap penilaian objektif. Perusahaan melakukan penilaian risiko untuk menentukan cara yang harus dilakukan untuk mengelola risiko. Dalam menilai risiko harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan eksternal dan internal perusahaan melalui model bisnis perusahaan tersebut karena dapat menyebabkan tidak efektifnya pengendalian internal. Asas-asas yang melambangkan komponen penilaian risiko adalah sebagai berikut:

- Keberadaan tujuan yang cukup spesifik untuk mengidentifikasi dan menilai risiko.
- Identifikasi risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan di seluruh lingkup perusahaan dan penilaian risiko tersebut untuk menentukan cara mengelolanya.
- Memperhatikan adanya potensi kecurangan yang terjadi.

- Identifikasi dan penilaian perubahan yang dapat berdampak signifikan pada sistem pengendalian internal perusahaan.
3. *Aktivitas Pengendalian (Control Activities)*
Aktivitas pengendalian merupakan aktivitas yang dilakukan melalui prosedur dan kebijakan yang dapat membantu untuk memastikan instruksi pengelolaan pengurangan risiko dari pencapaian tujuan. Aktivitas pengendalian dalam perusahaan dilakukan pada seluruh proses bisnis dan teknologi. Asas-asas yang melambangkan komponen penilaian risiko adalah sebagai berikut:
- Pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian membantu mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima.
 - Pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian melalui teknologi dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan.
 - Penyebaran aktivitas pengendalian secara spesifik dalam prosedur dan kebijakan.
4. *Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)*
Perusahaan memerlukan informasi di dalam pelaksanaan tanggung jawab pengendalian internal guna mendukung dalam pencapaian tujuan. Manajemen perusahaan memerlukan informasi yang berkualitas baik dari pihak internal maupun eksternal serta menggunakannya untuk mendukung fungsi komponen pengendalian internal. Sementara itu komunikasi dibutuhkan dalam perusahaan untuk menyediakan, memberikan, dan memperoleh informasi tersebut. Asas-asas yang melambangkan komponen informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:
- Memperoleh informasi yang berkualitas untuk mendukung fungsi dari pengendalian internal.

- Mengkomunikasikan informasi termasuk didalamnya tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung fungsi pengendalian internal.
 - Mengkomunikasikan persoalan pengendalian internal kepada pihak luar.
5. *Pemantauan (Monitoring)*
Evaluasi atau pemantauan dilakukan perusahaan untuk memastikan bahwa masing-masing komponen dari lima komponen pengendalian internal berfungsi dengan baik. Asas-asas yang melambangkan komponen pemantauan adalah sebagai berikut:
- Pemilihan, pengembangan, dan pelaksanaan evaluasi untuk memastikan fungsi dari tiap-tiap komponen pengendalian internal berjalan dengan baik.
 - Pelaksanaan evaluasi dan penyampaian kekurangan pengendalian internal kepada pihak yang berhubungan dengan pembenaran tindakan seperti senior manajer dan direksi.

Kelima komponen dan tujuh belas asas yang ada dalam COSO IC-IF menjadi dasar penilaian terhadap penerapan pengendalian internal gereja. Teketel dan Berhanu (2009) menjelaskan bahwa perancangan pengendalian internal memberi keyakinan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang terpercaya, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Pengendalian internal membantu organisasi dalam menyajikan laporan keuangan yang terpercaya, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan lebih baik. Dengan berjalannya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik, maka kepercayaan dari *stakeholders* (dalam hal ini Jemaat Gereja) dapat meningkat karena informasi yang disajikan terpercaya. Selanjutnya, Gereja akan memiliki tata kelola sumber daya yang lebih baik dengan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel di masa mendatang sehingga

dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan maupun kepada para jemaatnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Strategi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (*single case*) yang diaplikasikan pada satu unit analisis (*single unit analysis*). Menurut Yin (2003), studi kasus adalah metode penelitian untuk menyelidiki fenomena kontemporer di konteks kehidupan nyata. Studi kasus juga diartikan sebagai upaya mempelajari kekhususan dan kompleksitas sebuah kasus untuk memahami aktivitas dengan permasalahan-permasalahan yang penting Stake (1995). Penelitian ini memilih menggunakan studi kasus karena ingin menggali fenomena yang terjadi. Fenomena tersebut hanya dapat digali melalui metode studi kasus. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang diterapkan dalam Gereja Toraja ABC dan keterkaitannya dengan proses akuntabilitas pengelolaan keuangan. Evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui penerapan pengendalian internal yang baik.

Pendekatan/Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memahami proses dan fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam sehingga kemudian berdasarkan fenomena tersebut dapat diperoleh kesimpulan. Menurut Wahyuni (2015 dalam Hartanti, 2017), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan induktif dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam terkait pengalaman seseorang atau suatu kelompok. Menurut Sugiyono (2010 dalam Purnama, 2016), penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan suatu keadaan atau fenomena yang sekarang terjadi, untuk menjawab permasalahan secara aktual dengan menggunakan prosedur ilmiah. Dengan demikian metode penelitian kualitatif sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Hal ini

dikarenakan tujuan penggunaan metode ini adalah mengungkapkan pemahaman secara mendalam mengenai penerapan pengendalian internal serta bagaimana pengaruh dan keterkaitannya dengan proses akuntabilitas pengelolaan keuangan Gereja Toraja ABC. Metode penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengumpulkan dan menganalisa data dengan cara wawancara dengan para pihak terkait, melakukan observasi, dan mendokumentasikan hal yang menjadi poin utama penelitian. Dengan demikian dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai penerapan pengendalian internal dan proses akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sunyoto (2013 dalam Furqan, 2017), data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah berupa kebijakan petinggi dan pengurus yang berkaitan dengan akuntabilitas serta pengendalian internal yang diterapkan pada lembaga keagamaan. Data lembaga keagamaan yang tidak dipublikasikan diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pengurus organisasi gereja dan observasi terhadap keadaan di tempat penelitian.

Wawancara (komunikasi berupa tanya jawab) dilakukan dalam bentuk *semi-structured* dengan banyak pengembangan atau improvisasi secara langsung kepada subjek penelitian sehingga dapat menggali permasalahan secara lebih mendalam. Wawancara dilakukan kepada pengurus Gereja yang bertanggung jawab atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Petinggi Gereja yang bertanggung jawab dalam menerapkan pengendalian internal dalam Gereja Toraja ABC. Responden wawancara berjumlah empat, yaitu Bendahara Umum, Kasir, Majelis Jemaat, dan Jemaat umum. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme organisasi dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan menerapkan pengendalian internal. Teknik ini bertujuan

untuk mendapatkan informasi yang kompleks, seperti pendapat, sikap, serta pengalaman pribadi. Daftar pertanyaan wawancara didasarkan pada tahapan-tahapan dalam model akuntabilitas Bovens (2007) sehingga didapatkan gambaran pelaksanaan akuntabilitas keuangan. Kemudian berkaitan dengan pengendalian internal, pertanyaan-pertanyaan disesuaikan dengan komponen dalam COSO IC-IF. Hasil wawancara akan dibuat dalam bentuk transkrip kemudian dianalisis.

Observasi dilakukan dengan melihat dan mengamati keadaan di tempat penelitian untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan di gereja dalam menerapkan pengendalian internal, model akuntabilitas atas pengelolaan keuangan, serta data pendukung lainnya yang dibutuhkan. Observasi dilakukan terutama atas pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh para pengurus keuangan di tempat penelitian.

Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa data sekunder adalah data yang dikumpulkan atau diambil tidak dari sumber utamanya secara langsung, tetapi melalui media lain seperti dokumen, internet, dan orang lain. Contoh dari data ini umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder pada penelitian ini berkaitan dengan data dari penelitian terdahulu, laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh Gereja Toraja ABC, serta beberapa dokumen pendukung lainnya.

Analisis Data

Hasil wawancara dengan pengurus organisasi gereja, observasi, dan dokumentasi akan diolah menggunakan *descriptive qualitative analysis*. Menurut Hartanti (2017), *descriptive qualitative analysis* digunakan untuk menguraikan, menggambarkan, dan membandingkan data yang diperoleh selama penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menafsirkan dan menguraikan data yang ada dengan kejadian yang sedang terjadi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif atau “*bottom-up*”, yaitu analisis data, proses, dan fenomena yang ada untuk menghasilkan sebuah kesimpulan atau kerangka. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pengurus keuangan, dokumentasi laporan keuangan, pedoman umum, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, serta observasi atas pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh para pengurus keuangan di tempat penelitian, dianalisis dengan teori akuntabilitas dan COSO IC-IF, untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mendapatkan kesimpulan.

Unit Analisa

Penelitian ini dilakukan di Gereja Toraja ABC. Gereja Toraja ABC (lingkup Jemaat) adalah wujud dari Gereja Toraja yang berupa gereja lokal (setempat). Berdasarkan Buku Tata Gereja Toraja (2016) dapat dijelaskan bahwa Gereja Toraja Lokal sebagai persekutuan orang percaya (dalam iman kepada Allah dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus) di suatu tempat tertentu yang melaksanakan pemberitaan Firman Allah dan sakramen serta menjalankan tugas panggilannya untuk menjadi berkat bagi dunia. Kepengurusan dalam Gereja Toraja ABC untuk satu periode berlangsung selama tiga tahun. Gereja Toraja ABC dipilih sebagai unit penelitian berdasarkan beberapa alasan seperti yang telah dijelaskan di bagian pendahuluan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Gereja

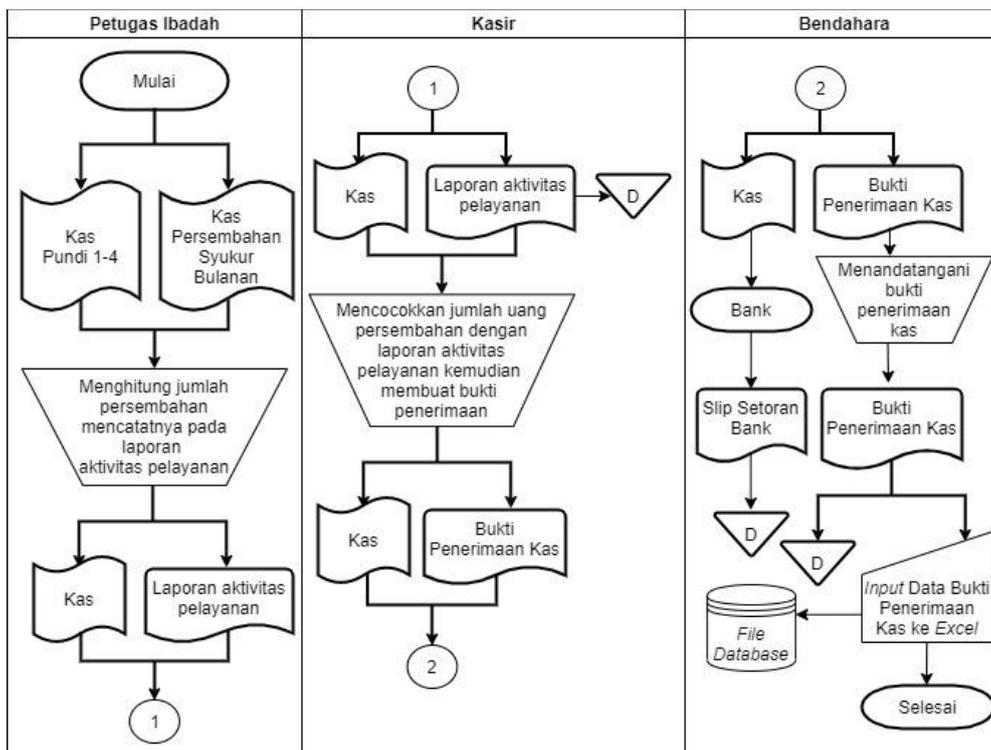
Proses penyusunan laporan keuangan telah mengikuti pedoman tersebut, walaupun belum sepenuhnya diterapkan dengan optimal. Laporan keuangan belum disusun dengan lengkap. Hal itu karena bendahara yang menjadi pengurus gereja tidak memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Laporan keuangan yang disusun mengikuti acuan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam pedoman, walaupun diharapkan ke depannya dapat diperbaiki sehingga dapat mengembangkan pelaporan keuangan yang

lebih lengkap (yaitu mencakup Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas) seperti yang ditetapkan oleh Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Harta Milik Gereja Toraja.

Melalui observasi dan wawancara di tempat penelitian, peneliti menemukan bahwa Laporan Keuangan disusun berdasarkan transaksi-transaksi operasional harian. Pengurus Gereja Toraja ABC yang bertugas di bidang keuangan terbagi dalam dua bagian, yaitu Bendahara dan Kasir. Bendahara terdiri dari tiga orang, yaitu Bendahara Umum, Wakil Bendahara I, dan Wakil Bendahara II. Transaksi yang berkaitan dengan kegiatan operasional gereja ditangani oleh Bendahara Umum. Transaksi yang berkaitan dengan dana transit, seperti untuk Badan Pekerja Sinode, pemeliharaan, pembangunan, dan keperluan khusus (pekabaran injil atau evangelisasi, perumahan dan pensiunan pendeta, dan sumbangan korban bencana kepada masyarakat umum) ditangani oleh Wakil Bendahara I. Sementara itu, untuk transaksi yang berkaitan dengan diakonia (bantuan sosial, sumbangan orang sakit, dan kedukaan

jemaat) ditangani oleh Wakil Bendahara II. Kemudian yang mengemban tugas sebagai kasir berjumlah satu orang yang juga merangkap sebagai petugas administrasi Jemaat. Kemudian yang mengemban tugas sebagai kasir berjumlah satu orang. Para bendahara tidak ada yang menetap bekerja di kantor Gereja. Hanya kasir yang menetap bekerja di kantor gereja, sehingga memiliki waktu luang yang lebih banyak dibandingkan bendahara. Tidak ada orang atau anggota pengurus Gereja yang dikhususkan untuk bertugas sebagai tenaga akuntansi atau pembukuan, sehingga Bendahara Umum yang merangkap tugas tersebut. Namun, karena kesibukan dari Bendahara Umum, maka tidak jarang akhirnya tenaga kasir yang merangkap tugas pembukuan. Akuntabilitas pelaporan keuangan Gereja Toraja ABC (selanjutnya disebut Gereja) difokuskan pada Laporan Penerimaan Uang, Laporan Pengeluaran Uang, dan Saldo Kas

Sistem penerimaan dana dari ibadah maupun lainnya yang diterima oleh bagian keuangan dapat digambarkan alurnya sebagai berikut:



Sumber: data diolah sendiri, tahun 2020

Gambar 1. Alur Prosedur Penerimaan Uang di Gereja.

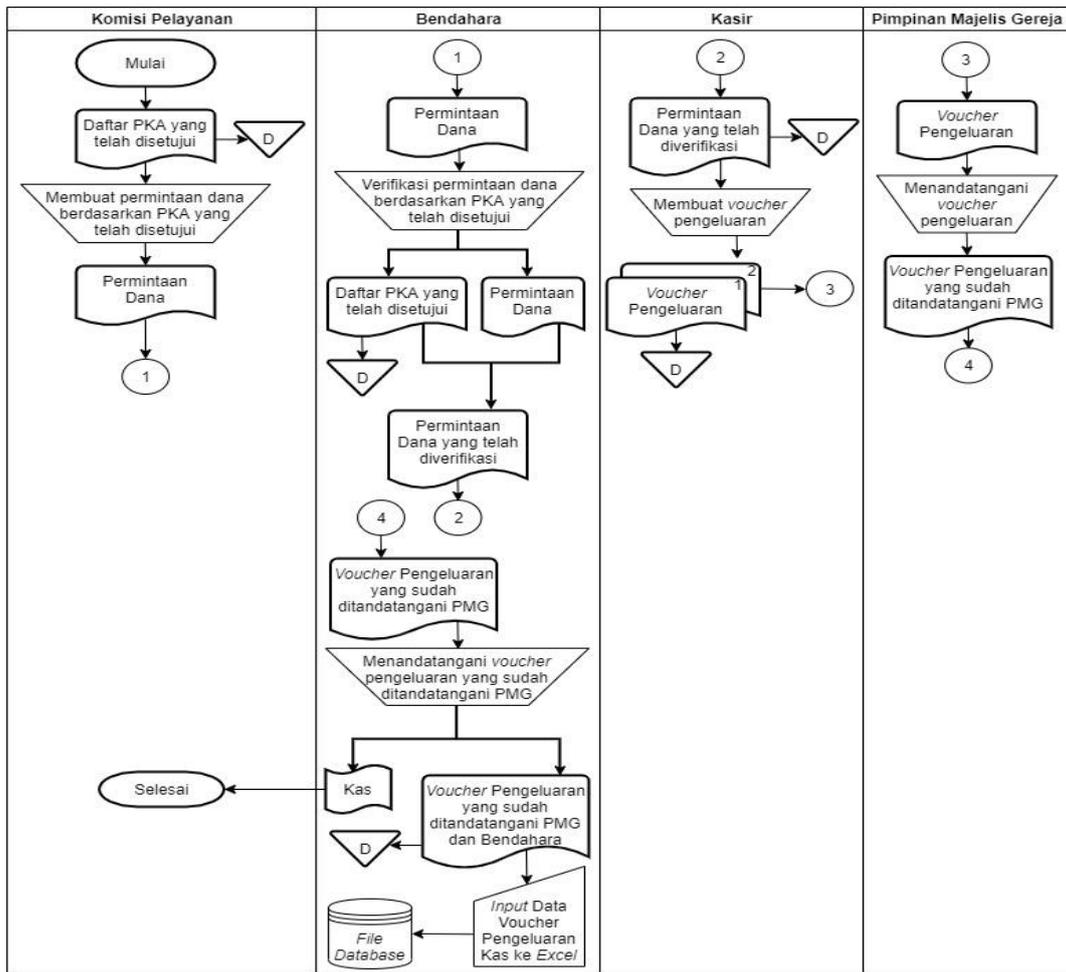
Sistem dan alur prosedur penerimaan uang sebagaimana Gambar 1 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Persembahan sukarela melalui pundi-pundi yang berjumlah empat dan Persembahan Syukur Bulanan (PSB), diterima Gereja melalui ibadah pada hari Minggu dan ibadah keluarga. Pundi satu digunakan untuk operasional jemaat, pundi dua digunakan untuk Badan Pekerja Sinode (Pengurus Pusat), pundi tiga digunakan untuk bantuan sosial, sumbangan orang sakit, dan kedukaan jemaat (diakonia), dan pundi empat digunakan untuk keperluan khusus (pada minggu pertama digunakan untuk pekabaran injil atau evangelisasi, minggu ketiga digunakan untuk perumahan dan pensiunan pendeta, dan minggu-minggu lainnya dapat diperuntukkan sebagai sumbangan korban bencana kepada masyarakat umum). Berbagai persembahan ini disetor oleh petugas ibadah kepada kasir pada saat selesai ibadah hari Minggu dan untuk ibadah keluarga biasanya disetor sehari sesudahnya bahkan lebih.
- b. Kasir akan membuat bukti penerimaan atau *voucher* penerimaan berupa laporan pelayanan yang ditandatangani oleh penyetor (petugas ibadah) dan kasir/bendahara.
- c. Selanjutnya *voucher* penerimaan itu harus dicek dan ditandatangani oleh bendahara,

jika penerimaan terjadi diluar hari Minggu. Dalam pelaksanaannya, bendahara baru bisa menandatangani keseluruhan *voucher* pada saat datang ke kantor Gereja. Hal ini terjadi karena kesibukan dan bendahara bukanlah pegawai kantor yang setiap hari ada di Gereja. Kecuali untuk penerimaan pada ibadah hari Minggu, Bendahara bisa langsung menandatangani, karena ada di kantor Gereja.

- d. Uang persembahan sukarela melalui pundi-pundi yang berjumlah empat dan PSB disetor ke bank pada saat jam kerja. Jika diterima sudah melewati hari kerja akan disetor pada keesokan harinya.
- e. *Voucher* penerimaan dan bukti setor bank diserahkan ke bagian pembukuan untuk dicatat dalam pembukuan dengan program *Microsoft Excel*.

Dalam sistem transaksi pengeluaran operasional, kasir menggunakan dana dari *Petty Cash* sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah untuk kegiatan rutin. *Petty Cash* menggunakan metode *imprest* (tetap) yang akan di isi kembali agar jumlahnya tetap satu juta lima ratus ribu rupiah. Kasir akan melampirkan bukti-bukti pengeluaran selama seminggu. Untuk pengeluaran besar untuk Program Kerja Anggaran (PKA), maka dana dikeluarkan oleh Bendahara. Hal ini dapat digambarkan dalam Gambar 2 berikut ini:



Sumber: data diolah sendiri, tahun 2020

Gambar 2. Alur Prosedur Pengeluaran Uang di Gereja.

Adapun penjelasan dari sistem dan alur prosedur pengeluaran uang seperti yang digambarkan di Gambar 2 sebagai berikut:

- Kasir atau bendahara menerima permintaan dana secara rutin dari berbagai bidang/komisi yang ada di Gereja.
- Kasir membuat *voucher* pengeluaran berdasarkan permintaan (melalui anggaran, sesuai komisi/bidang) berdasarkan pengecekan oleh bendahara atas program yang sudah dianggarkan (sesuai anggaran komisi/bidang).
- Lalu *voucher* beserta lampirannya diserahkan kepada Bendahara, Ketua masing-masing bidang/komisi yang membawahi mata anggaran program tersebut, dan Pimpinan Majelis Gereja untuk ditandatangani (sering tidak ditandatangani oleh ketua masing-masing bidang/komisi, sehingga hanya ditandatangani oleh Bendahara dan Pimpinan Majelis Gereja).
- Setelah ada tandatangan atau persetujuan dari bendahara, ketua bidang/komisi, dan Pimpinan Majelis Gereja, maka bendahara berhak mengeluarkan uang. Namun, karena keterbatasan waktu dari bendahara dan ketua bidang/komisi sehingga sering persetujuan dilakukan lewat percakapan telepon (juga melalui *WhatsApp* supaya tertulis, ada bukti *screenshot* serta waktunya).
- Lalu *voucher* penerimaan beserta lampirannya diserahkan kepada staf pembukuan untuk dicatat dalam program *Microsoft Excel*

Semua transaksi terjadi setiap hari dan pada hari Kamis pembukuan ditutup, kemudian diperiksa oleh bendahara setiap hari

Jumat. Dengan demikian jika ada transaksi yang terjadi pada hari Jumat, maka transaksi tersebut akan dimasukkan pada laporan keuangan minggu berikutnya. Laporan disajikan secara mingguan dan bulanan (terutama untuk PSB yang hanya sebulan sekali oleh tiap jemaat) pada setiap ibadah hari Minggu. *Voucher* pendapatan dan pengeluaran untuk periode satu minggu tersebut disatukan untuk diperiksa.

Bendahara mengungkapkan bahwa mereka selalu menghabiskan waktu beberapa jam untuk memeriksa dan menganalisis setiap transaksi yang dibukukan dengan memeriksa langsung pada *voucher* yang sudah terkumpul serta melakukan rekonsiliasi rekening bank termasuk pemeriksaan data yang diinput secara manual ke *Microsoft Excel* oleh tenaga pembukuan. Bendahara mengecek langsung penerimaan Persembahan dan PSB pada saat ibadah Minggu dan ibadah keluarga. Jika ada kesalahan yang ditemukan, maka segera dilakukan koreksi pada saat itu. Pengeluaran yang besar (di atas satu juta lima ratus ribu rupiah, berdasarkan kebijakan Majelis Gereja) perlu melalui persetujuan Pimpinan Majelis Gereja kemudian dibayarkan oleh Bendahara. Hal ini dikarenakan, kasir tidak memegang uang kas lebih dari jumlah yang ditetapkan sebagai *Petty Cash*.

Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Harta Milik Gereja Toraja menjadi acuan bagi Gereja Lokal yang bernaung pada Sinode Gereja Toraja. Dalam pedoman tersebut disediakan format laporan keuangan untuk Gereja Lokal seperti Gereja Toraja ABC. Laporan keuangan yang disusun oleh Gereja Toraja ABC sudah mengikuti petunjuk dari Pedoman tersebut, walaupun dengan sedikit modifikasi yang disesuaikan dengan karakteristik Gereja Lokal. Laporan Penerimaan Uang, Laporan Pengeluaran Uang, dan Saldo Kas adalah laporan keuangan yang perlu disusun pada Gereja Toraja Lokal yang belum mampu mengembangkan pelaporan keuangan secara lengkap. Gereja Toraja ABC belum mampu mengembangkan pelaporan keuangan secara lengkap karena para pengurus keuangan tidak ada yang berlatar belakang akuntansi atau keuangan.

Jika sumber daya memadai, maka ke depannya Gereja Lokal seperti Gereja Toraja ABC dihimbau oleh Petinggi Pusat (Sinode) untuk turut menyusun dan menyertakan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas.

Berdasarkan analisis atas hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penyusunan laporan keuangan oleh bendahara Gereja, diketahui bahwa walaupun di tengah kesibukan pekerjaan sehari-harinya (bukan pegawai khusus di Gereja), bendahara telah berusaha menyusun laporan keuangan Gereja (Laporan Penerimaan Uang, Laporan Pengeluaran Uang, dan Saldo Kas) dengan sebaik mungkin, terutama dengan menghabiskan waktu beberapa jam dalam penyusunannya. Hal ini patut diapresiasi, mengingat bahwa bendahara bukanlah orang yang memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Bendahara juga telah berusaha untuk menyusun laporan keuangan agar akuntabel sesuai dengan acuan yang diberikan dalam Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Harta Milik Gereja Toraja. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan pedoman dan dipublikasikan adalah bentuk akuntabilitas aktor (bendahara) kepada forum (jemaat).

Dalam mengevaluasi tiap tahapan pelaksanaan dan proses akuntabilitas pelaporan keuangan berdasarkan Bovens (2007), peneliti menilai berdasarkan daftar pertanyaan dari tiap tahapan dan aspek dalam ketiga dimensi *accountability cube* berdasarkan Brandsma dan Schillemans (2012). Hal tersebut dijadikan pedoman untuk mengevaluasi pelaksanaan akuntabilitas pelaporan keuangan di Gereja Toraja ABC. Jika semua pertanyaan dari tiap tahapan telah berjalan sesuai dengan aspek dari tiap dimensi *accountability cube*, maka tahapan akuntabilitas Bovens (2007) tersebut telah berjalan dengan optimal. Sedangkan jika semua pertanyaan dari tiap tahapan belum berjalan sesuai dengan aspek dari tiap dimensi *accountability cube*, maka tahapan akuntabilitas Bovens (2007) tersebut belum berjalan dengan optimal.

Informing about Conduct

Publikasi laporan keuangan Gereja (penerimaan, pengeluaran, dan saldo kas) dilakukan tiap minggu saat ibadah Minggu dan tiap bulan untuk PSB sesuai kebijakan Majelis Gereja sebagai kebutuhan publikasi kepada jemaat. Laporan keuangan yang dipublikasikan merupakan laporan keuangan atas transaksi dari satu minggu sebelumnya yang dipublikasikan melalui media cetak, yaitu warta jemaat. Hal ini menunjukkan bahwa aktor telah mempublikasikan informasi laporan keuangan Gereja secara tepat waktu dan cukup memadai. Walaupun demikian, ke depannya Gereja Toraja ABC dihibmabau oleh Petinggi Pusat (Sinode) untuk turut menyusun dan menyertakan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas, saat sumber daya Gereja Toraja ABC sudah dapat mendukung (pengurus keuangan yang berlatar belakang akuntansi atau keuangan).

Bendahara mengungkapkan bahwa transaksi-transaksi yang dipublikasikan cukup dapat terjamin akuntabilitasnya. Namun demikian, pemeriksaan dan analisis terhadap setiap transaksi yang dibukukan hanya dilakukan sekali seminggu, yaitu tiap hari Jumat. Hal tersebut dilakukan dengan memeriksa langsung pada *voucher* yang sudah terkumpul serta melakukan rekonsiliasi rekening bank, termasuk pemeriksaan data yang diinput secara manual ke *Microsoft Excel* oleh tenaga pembukuan. Bendahara dan kasir telah memeriksa dan menganalisis secara detail setiap transaksi maupun lampiran dokumen pendukungnya yang menghabiskan waktu beberapa jam. Hal tersebut adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab dari para pengurus keuangan Gereja. Namun, penginputan masih bersifat manual di *Microsoft Excel*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesalahan penginputan maupun perhitungan dapat terjadi, sehingga mengurangi akuntabilitas laporan keuangan Gereja. Majelis jemaat dan bendahara merencanakan akan menggunakan aplikasi akuntansi di masa yang akan datang. Dalam kepengurusan majelis jemaat, komisi verifikasi berperan sebagai audit internal bagi Gereja Toraja ABC. Jemaat pada umumnya

percaya bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan telah akuntabel karena sudah diperiksa oleh Komisi Verifikasi.

Berdasarkan analisis atas hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi atas pelaporan keuangan Gereja, diketahui bahwa penyusunan laporan keuangan awalnya mengikuti model yang telah dilaksanakan oleh pengurus periode sebelumnya. Tetapi, perubahan format pelaporan keuangan mulai dilakukan pada tahun 2018 setelah mendapatkan saran dari Gereja Toraja Lokal lainnya dan disesuaikan dengan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Harta Milik Gereja Toraja yang diterbitkan Sinode Gereja Toraja pada tahun 2018.

Dalam mempublikasikan informasi laporan keuangan kepada forum, aktor telah menyajikannya dengan baik secara tepat waktu dan memadai. Direncanakan ke depannya, informasi laporan keuangan akan dipublikasikan menggunakan media virtual melalui *group WhatsApp* Jemaat Gereja. Berdasarkan dimensi pertama *Accountability Cube* dari Brandsma dan Schillemans (2012), informasi yang disajikan telah mencukupi karena informasi laporan keuangan yang dipublikasikan telah sesuai dengan acuan pedoman, sehingga tingkat akuntabilitasnya cukup. Oleh karena itu, tahapan pertama (*Informing about Conduct*) sesuai teori akuntabilitas Bovens (2007) cukup berjalan dengan baik, walaupun masih memerlukan perbaikan peningkatan penyajian informasi dengan turut menyusun dan menyertakan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas. Laporan pelengkap tersebut dapat ditambahkan saat sumber daya Gereja Toraja ABC telah memadai, terutama memiliki pengurus keuangan yang berlatar belakang akuntansi atau keuangan (yaitu dengan merekrut tenaga baru atau memberikan pelatihan kepada pengurus yang ada). Dari hasil analisis wawancara, observasi, dan dokumentasi bentuk pelaporan keuangan Gereja, diketahui bahwa penyusunan laporan keuangan mengikuti yang telah dilaksanakan oleh pengurus periode sebelumnya. Namun, ke depannya perlu lebih menyesuaikan dengan pedoman. Dalam mempublikasikan

informasi laporan keuangan kepada forum, aktor telah menyajikannya dengan baik melalui media cetak (warta jemaat) saat ibadah hari minggu secara tepat waktu dan memadai, namun informasi laporan keuangan tersebut kurang dapat diandalkan karena pengurus keuangan gereja tidak memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Sehingga tahapan pertama (*informing about conduct*) sesuai teori akuntabilitas Bovens (2007) belum sepenuhnya berjalan dengan optimal.

Debating

Jemaat berhak untuk menanggapi pelaporan keuangan Gereja, karena uang mereka dikelola oleh para pengurus Gereja dan digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan serta untuk kepentingan Jemaat maupun masyarakat umum. Kesempatan untuk melakukan tanya jawab antara aktor (bendahara) dan forum (jemaat) mengenai laporan keuangan diberikan seluas-luasnya. Namun demikian, pertanyaan hanya terkait kesalahan pencatatan persembahan jemaat bahkan hal tersebut jarang terjadi. Bendahara menyampaikan sebagai berikut:

”Pernah ada Jemaat yang mengajukan protes karena PSBnya tidak ditampilkan dalam laporan keuangan, maka saya menghubungi Pelayan yang bertugas saat jadwal ibadah itu untuk mencari tahu, akhirnya setelah ditelusuri, penerimaan tersebut tidak tercatat. Ada pula jemaat lain yang mempertanyakan PSBnya, setelah ditelusuri ternyata jemaat tersebut lupa mencantumkan namanya pada amplop PSB sehingga dicatat sebagai PSB lain-lain. Dulu beberapa kali terjadi selisih perhitungan penerimaan persembahan di ibadah minggu, sehingga pernah salah satu bendahara mengganti selisih tersebut dengan uang pribadinya” (Responden BU, 2020).

Kejadian-kejadian seperti itu langsung diselesaikan secepat mungkin, karena hal seperti ini merupakan hal yang sensitif. Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak

(aktor dan forum) saling mendengarkan satu sama lain, terutama saat terjadi permasalahan. Pengurus Keuangan Gereja pun merasa bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab mereka, sehingga berusaha menemukan solusi sesegera mungkin, karena jika ditunda maka akan lebih sulit untuk diatasi mengingat para pengurus pun cukup sibuk dengan kegiatan sehari-harinya. Hal ini menunjukkan aktor diberikan kesempatan untuk menjelaskan tindakannya dalam penyusunan laporan keuangan. Salah satu jemaat pun menjelaskan bahwa sebagian besar jemaat percaya saja dengan Pengurus Keuangan Gereja, yang dalam wawancara menyampaikan sebagai berikut:

” Kebanyakan jemaat percaya saja dengan pengelolaan keuangan oleh Pengurus Keuangan Gereja. Jarang ada jemaat yang mau betul-betul memeriksa dengan lebih teliti laporan keuangan yang dipublikasikan. Apalagi terdapat anggapan bahwa menjalankan tugas sebagai Pengurus Keuangan Gereja merupakan bentuk pelayanan kepada Tuhan dan Gereja.” (Responden A dalam lampiran 3, 2020).

Kepercayaan jemaat yang tinggi dan rendahnya inisiatif untuk memeriksa dengan lebih teliti, menyebabkan intensitas diskusi atas laporan keuangan masih rendah. Aktor diberikan kesempatan untuk menjelaskan tindakannya dalam penyusunan laporan keuangan, namun proses ini sangat jarang dilakukan. Padahal kesempatan untuk melakukan tanya jawab antara aktor (bendahara) dan forum (jemaat) mengenai laporan keuangan telah diberikan seluas-luasnya, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik.

Berdasarkan dimensi kedua *Accountability Cube* dari Brandsma dan Schillemans (2012), intensitas diskusi masih minim, sehingga tingkat akuntabilitasnya rendah. Oleh sebab itu dari sudut pandang tahapan kedua dalam teori akuntabilitas Bovens (2007), tahap *Debating* kurang optimal dijalankan.

Judging

Penilaian atas laporan keuangan Gereja dapat dilakukan dalam rapat majelis jemaat Gereja. Majelis merupakan perwakilan dari jemaat Gereja Toraja ABC. Selain itu, jemaat yang tidak termasuk majelis dipersilahkan untuk mengikuti rapat majelis tersebut. Dapat dikatakan bahwa forum yang menilai hasil kerja aktor cukup independen. Hal ini terutama dikarenakan majelis jemaat memiliki tanggung jawab untuk menjaga pelaksanaan kegiatan Gereja tetap sesuai ajaran agama yang memperjuangkan kebenaran. Selain itu, majelis jemaat juga mempunyai wewenang untuk mengoreksi kekeliruan dalam jemaat.

Sejauh ini jemaat menerima dengan baik laporan keuangan yang disusun oleh Pengurus Keuangan Gereja terutama karena sudah diperiksa oleh komisi verifikasi. Namun demikian, dalam berbagai kesempatan, ada juga jemaat yang mengusulkan agar proses penyusunan laporan keuangan diperbaiki mekanismenya. Beberapa jemaat merasa bahwa para Pengurus Keuangan Gereja masih kurang memahami penyusunan laporan keuangan. Bendahara pun menyampaikan sebagai berikut:

“Saya sering merasa kesulitan dalam menyusun laporan keuangan, karena saya bukan orang yang berlatar belakang akuntansi atau keuangan. Jemaat pun memaklumi kondisi tersebut, sehingga jemaat menerima saja laporan keuangan yang disusun.”
(Responden BU dalam lampiran 2, 2020)

Jemaat menilai pelaporan keuangan Gereja sudah baik. Hal tersebut karena kurangnya pemahaman jemaat terhadap laporan keuangan. Selain itu, Komisi Verifikasi pun sering mengingatkan kepada Pengurus Keuangan Gereja agar penyusunan laporan keuangan menyesuaikan dengan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Harta Milik Gereja Toraja. Pengurus Keuangan Gereja tidak sepenuhnya mengikuti pedoman tersebut. Dikarenakan oleh kurangnya pemahaman, awalnya bendahara

sering menyusun laporan keuangan berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh bendahara periode sebelumnya. Laporan keuangan periode sebelumnya tersebut memiliki sedikit perbedaan dibandingkan pedoman. Jemaat memaklumi keterbatasan para Pengurus Keuangan Gereja tersebut. Oleh sebab itu, dalam penilaian terhadap laporan keuangan tidak ada sanksi jika ada kesalahan. Kesalahan tersebut menjadi bahan evaluasi agar dapat diperbaiki di periode berikutnya.

Berdasarkan dimensi ketiga *Accountability Cube* dari Brandsma dan Schillemans (2012), tidak adanya konsekuensi berupa sanksi jika ada kesalahan, menyebabkan tingkat akuntabilitasnya dikategorikan sebagai rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa *Judging* sebagai tahapan ketiga dalam teori akuntabilitas Bovens (2007) berjalan kurang optimal. Kurangnya komunikasi antara aktor dan forum menunjukkan rendahnya tingkat akuntabilitas dalam pelaporan keuangan Gereja Toraja.

Berdasarkan pembahasan masing-masing tahapan akuntabilitas yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pelaporan Keuangan Gereja Toraja ABC belum optimal. Berdasarkan *Accountability Cube* dari Brandsma dan Schillemans (2012), hanya pada dimensi pertama (jumlah informasi) tingkat akuntabilitasnya dinilai cukup, sedangkan pada dimensi kedua (intensitas diskusi) dan dimensi ketiga (pengaruh konsekuensi) tingkat akuntabilitasnya rendah. Komunikasi antara aktor dan forum yang melibatkan ketiga dimensi kubus masih kurang, sehingga tingkat akuntabilitas Gereja Toraja ABC masih rendah.

Pelaksanaan tahapan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan di Gereja Toraja ABC berdasarkan akuntabilitas Bovens (2007), yaitu *Debating* dan *Judging* kurang berjalan dengan optimal. Hanya tahapan pertama, yaitu *Informing about Conduct* yang berjalan dengan baik. Tiap tahapan menyediakan ruang bagi forum (jemaat) untuk menguji dan menilai hasil laporan keuangan yang disusun. Namun demikian, tingginya kepercayaan jemaat kepada Pengurus Keuangan Gereja dan

minimnya kepedulian jemaat menyebabkan penerapan tahapan akuntabilitas menjadi kurang optimal. Tingginya tingkat kepercayaan jemaat kepada para pengurus keuangan dan minimnya kepedulian jemaat terhadap pengelolaan keuangan Gereja juga dikarenakan jemaat lebih menaruh perhatian pada pemberian kepada Tuhan dan Gereja melalui persembahan, namun kurang memperhatikan perihal pengelolaannya.

Para pengurus keuangan telah melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel di tengah kesibukan mereka. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dengan menguji kebenaran atau kecocokan perhitungan secara horizontal maupun vertikal (*footing* dan *cross footing*), menelusuri *voucher* transaksi dibandingkan dengan bukti-bukti yang menunjang validitas transaksi (*vouching*) serta melakukan rekonsiliasi bank. Waktu perlu diluahkan karena para Pengurus Keuangan Gereja bukan khusus sebagai pegawai Gereja, tetapi sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan dan Gereja. Hal ini menunjukkan bahwa selaku *steward*, para Pengurus Keuangan Gereja telah berusaha memprioritaskan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan pribadi sebagai bentuk *stewardship*. Oleh karena hal tersebut berhubungan erat dengan pelayanan kepada Tuhan dan sesama, maka Tuhan Sang Penyelenggara kehidupan akan memberikan rahmat-Nya kepada mereka yang diperkenankan sesuai dengan kebijaksanaan Tuhan, terutama kepada mereka yang melayani Tuhan dan Gereja.

Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan Gereja

Control Environment

Gereja Toraja ABC sebagai organisasi keagamaan berpedoman pada Kitab Suci (Alkitab), pokok-pokok ajaran Gereja Toraja, dan Tata Laksana Gereja dalam melaksanakan tugas organisasinya. Nilai-nilai alkitabiah tersebut yang dijadikan dasar dan arahan oleh para pemimpin dan pengurus gereja sebagai nilai etika dalam kehidupan menggereja. Penerapan nilai-nilai tersebut ditunjukkan

melalui sikap Majelis Jemaat Gereja selaku pihak yang memangku jabatan gerejawi (pimpinan) kepada segenap pengurus dan jemaat Gereja. Dengan begitu, para pengurus maupun jemaat gereja pun meneladani tindakan dan arahan dari Majelis Jemaat. Setiap pemimpin maupun pengurus sama-sama saling mengingatkan agar selalu menjaga integritas dan nilai-nilai etik dalam melaksanakan pelayanan gereja. Para pemimpin maupun pengurus yang menyeleweng dari nilai-nilai etika dan sikap integritas akan ditegur dan diberikan konseling oleh pendeta selaku gembala gereja dan Majelis Jemaat. Untuk pengurus keuangan, pelaporan keuangan yang jujur lebih diutamakan daripada menyajikan laporan yang baik demi mencapai tujuan tertentu. Integritas dan nilai-nilai etik dijunjung tinggi dalam tugas pelayanan gereja, karena bukan hanya sebagai bentuk pelayanan kepada sesama tetapi juga kepada Tuhan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etik telah berjalan dengan optimal.

Majelis Jemaat sebagai representasi atau perwakilan jemaat berperan sebagai dewan pengawas. Majelis Jemaat bertugas untuk mengawasi kinerja para pengurus keuangan gereja. Laporan keuangan tahunan dan pergantian periode kepengurusan dilaporkan pada rapat majelis sebagai proses pengawasan keuangan gereja. Kemudian laporan keuangan tersebut dipublikasikan kepada jemaat gereja. Pemilihan pengurus gereja dilakukan secara kolektif dan sukarela. Majelis Gereja menyeleksi calon pengurus dari antara jemaat yang dianggap mampu untuk menjalankan tugas. Setelah pengurus terpilih, maka mereka akan diteguhkan untuk mengemban tanggung jawab kepengurusan gereja. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek pengembangan kinerja pengendalian internal diawasi oleh dewan pengawas telah berjalan dengan optimal.

Adanya pedoman umum pengelolaan keuangan dan harta milik Gereja Toraja menunjukkan bahwa ada standar yang ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, pedoman tersebut masih

kurang optimal dalam penerapannya. Dalam pedoman umum tersebut tidak dicantumkan bagan struktur kepengurusan Gereja Toraja, padahal dengan adanya bagan struktur maka pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang dapat terlihat dengan lebih jelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek struktur, pelaporan, dan otoritas serta tanggung jawab yang sesuai dalam mencapai tujuan yang dibuat oleh manajemen dengan pengawasan dari dewan pengawas belum berjalan dengan optimal.

Dalam mencapai visi dan misinya, Gereja Toraja ABC membutuhkan orang-orang yang kompeten untuk menjadi pengurus gereja. Walaupun jemaat Gereja Toraja ABC memiliki latar belakang yang beragam, tapi tidak dapat memenuhi semua kompetensi yang dibutuhkan dalam komisi/bidang pelayanan. Menjadi pengurus gereja adalah bentuk pelayanan (*stewardship*), sehingga pengurus yang terpilih biasanya karena kesukarelaan mereka maupun karena karakter mereka yang dianggap dapat dipercaya untuk mengemban tugas. Bendahara Gereja Toraja ABC pun terpilih sebagai pengurus keuangan bukan karena berlatar belakang akuntansi atau keuangan, melainkan karena karakternya yang baik sehingga dipercaya untuk mengemban tugas tersebut. Di sisi lain, para jemaat lain umumnya enggan ditunjuk atau mengajukan diri sebagai Bendahara. Hal tersebut karena menjadi bendahara dianggap sebagai tugas yang sensitif, karena menyangkut uang Jemaat. Pedoman umum mengizinkan untuk mengangkat atau mempekerjakan pihak luar sebagai biro akuntansi atau keuangan. Namun, Gereja Toraja ABC lebih memilih untuk mempercayakan tugas tersebut kepada orang yang dianggap dapat dipercayai, walaupun tidak mempunyai kecakapan dalam ilmu akuntansi atau keuangan. Pengurus keuangan gereja juga telah berusaha menjalankan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek komitmen untuk melaksanakan, mengembangkan, serta mempertahankan jiwa kompeten dalam menyelaraskan tujuan belum berjalan dengan optimal.

Dalam pencapaian tujuan, tiap anggota pengurus organisasi perlu bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Untuk menilai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari tiap personil, diperlukan penilaian kinerja untuk mengukurnya. Gereja Toraja ABC tidak memiliki pengukuran kinerja yang baku seperti pada perusahaan atau organisasi lainnya, terutama diluar organisasi nirlaba keagamaan. Penetapan pengukuran kinerja cukup sulit, karena setiap pengurus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai bentuk pelayanan. Jika ada pengurus yang kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, maka pengurus tersebut tidak langsung diberhentikan atau diberi hukuman. Tetapi, kemungkinan besar tidak dipilih kembali menjadi pengurus di periode berikutnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek meminta pertanggungjawaban individu atas tugas dan wewenang pengendalian internalnya dalam mencapai tujuan belum berjalan dengan optimal.

Risk Assessment

Dalam Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Harta Milik Gereja Toraja disebutkan bahwa pengelolaan keuangan Gereja dilaksanakan demi kemuliaan Allah. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi bagi jemaat dan pihak lain yang berkepentingan terhadap pelaksanaan penatalayanan (*stewardship*) oleh Gereja Toraja melalui panggilannya untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Program Kerja Anggaran (PKA) dirancang agar pelayanan oleh gereja dapat berjalan sesuai tujuan sekaligus sebagai alat kontrol.

Dalam organisasi keagamaan, tidak berarti pelaksanaan tugasnya bebas dari risiko. Terdapat risiko-risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Risiko utama yang diidentifikasi oleh Gereja Toraja ABC adalah pelaksanaan program kerja oleh komisi/bidang yang tidak sejalan dengan tujuan gereja. Pengajuan tersebut harus sesuai dengan tujuan Gereja. Penggunaan dana/sumber daya gereja untuk pelaksanaan program kerja juga harus

dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan peruntukannya, agar dana/sumber daya gereja tidak diselewengkan. Dokumen pengeluaran dana untuk pelaksanaan program kerja maupun kejadian insidental berisiko diselewengkan. Risiko berikutnya yang diidentifikasi oleh pihak Gereja Toraja ABC adalah kehilangan, perusakan, pencurian, dan penyalahgunaan dokumen dan catatan gereja, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Terhadap beberapa risiko yang telah diidentifikasi di atas, pihak Gereja Toraja ABC meresponnya dengan mengurangi risiko. Kemungkinan keterjadian dan dampaknya dikurangi dengan mengimplementasikan pengendalian internal, berupa aktivitas-aktivitas pengendalian.

Potensi kecurangan yang paling utama dipertimbangkan adalah pencurian uang persembahan. Namun, dalam pelaksanaan berbagai fungsi akuntansi atau keuangan risiko penyalahgunaan dana, pencatatan maupun wewenang tidak diidentifikasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek mempertimbangkan adanya potensi kecurangan yang terjadi belum berjalan dengan optimal.

Gereja Toraja ABC tidak mengidentifikasi maupun melakukan penilaian terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal yang dapat berdampak signifikan pada pengendalian internal organisasi. Pada tahun 2018 gereja melakukan perubahan format pelaporan keuangan setelah mendapatkan saran dari Gereja Toraja Lokal lainnya. Ternyata perubahan tersebut karena Sinode Gereja Toraja telah menyusun Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Harta Milik Gereja Toraja. Setiap tiga tahun, periode kepengurusan gereja berakhir dan dilakukan penggantian kepengurusan. Dalam pergantian kepengurusan tersebut, dapat terjadi perbedaan gaya kepemimpinan maupun penetapan kebijakan. Oleh karena itu, visi dan misi Gereja Toraja ABC dijadikan alat untuk mengarahkan para pengurus agar berusaha mencapai tujuan dengan baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek identifikasi dan penilaian perubahan yang dapat berdampak

signifikan pada sistem pengendalian internal organisasi belum berjalan dengan optimal.

Control Activities

PKA diajukan oleh masing-masing komisi dan didiskusikan dengan Majelis Jemaat pada rapat majelis. Prosedur permintaan pengeluaran dana telah dijelaskan sebelumnya. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan dana akan dipertanggungjawabkan saat rapat majelis. Untuk menangani risiko penyelewengan dokumen pengeluaran dana, aktivitas pengendaliannya berupa persetujuan dari pihak yang berwenang. Dalam hal otorisasi, transaksi disetujui dan dieksekusi hanya oleh orang yang berwenang. *General authorization* diberikan kepada tiap bendahara dalam menangani transaksi yang ditangani oleh masing-masing bendahara (pundi satu hingga empat). Kemudian untuk transaksi rutin kantor gereja diberikan kepada kasir dengan pemberian *petty cash*. *Specific authorization* memerlukan persetujuan Ketua atau Wakil Ketua Majelis Jemaat. Transaksi yang membutuhkan *specific authorization* tersebut adalah pengeluaran dana untuk program kerja dan kebutuhan insidental. Penerimaan dana dihitung jumlah lembar tiap pecahan yang diterima dan dicatat sebagai laporan lembar hitung kolekte. Hal ini dilakukan untuk mengurangi potensi kecurangan, yaitu pencurian uang persembahan. Pencatatan dilakukan secara sederhana dan berbasis kas. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas belum menggunakan metode *double entry*. Pemisahan tugas (antara *custody*, pencatatan/akuntansi atau pembukuan, dan wewenang atau otorisasi) belum berjalan dengan baik di Gereja Toraja ABC. Hal tersebut terlihat dari fungsi pencatatan dan fungsi otorisasi yang masih dirangkap oleh orang yang sama. Dalam pedoman umum pun tidak ada penjelasan maupun aturan tentang pembagian tugas tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian yang membantu mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima belum berjalan dengan optimal.

Dalam pemanfaatan teknologi, penginputan dilakukan secara manual ke *Microsoft Excel*. Kesalahan penginputan maupun perhitungan dapat terjadi. Berbagai data administrasi maupun keuangan Gereja disimpan di ruangan khusus dalam kantor Gereja untuk data yang berbentuk *hardcopy* dan komputer kantor gereja untuk data yang berbentuk *softcopy*. Berbagai data *hardcopy* maupun komputer tersebut berada dalam ruangan tersendiri dan hanya orang-orang tertentu yang diizinkan memasuki ruangan tersebut. Untuk pencadangan data *softcopy* administrasi dan keuangan, Bendahara menyimpan cadangan file pada *flash disk*. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek pemilihan dan pengembangan aktivitas pengendalian melalui teknologi dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan belum berjalan dengan optimal.

Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Harta Milik Gereja Toraja belum sepenuhnya diterapkan karena kurangnya sosialisasi kepada pengurus keuangan Gereja Toraja Lokal. Pedoman Umum tersebut sudah mulai berlaku tahun 2018, namun baru mau mulai pelajari lebih dalam oleh Gereja Toraja ABC pada awal tahun 2020. Dengan memahami pedoman dengan baik, diharapkan ke depannya pelaksanaan aktivitas pengendalian, terutama dalam hal pelaporan keuangan dapat ditingkatkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek penyebaran aktivitas pengendalian secara spesifik dalam prosedur dan kebijakan belum berjalan dengan optimal.

Information and Communication

Pengumpulan informasi sumber penerimaan dana dan tujuan pengeluaran dana dijelaskan oleh Bendahara pada saat proses pelaporan keuangan. Namun demikian, penyampaian informasi keuangan dalam rapat majelis masih minim dilakukan. Penyampaian tersebut biasanya dilakukan setahun sekali dan saat pergantian kepengurusan (tiga tahun sekali). Minimnya intensitas penyampaian informasi keuangan dalam rapat majelis, karena laporan keuangan sudah dipublikasikan kepada jemaat setiap ibadah hari Minggu. Hal tersebut menunjukkan

bahwa aspek memperoleh informasi yang berkualitas untuk mendukung fungsi pengendalian internal belum berjalan dengan optimal.

Dalam hal pengkomunikasian kebijakan kepada seluruh pengurus, Gereja Toraja memiliki Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Harta Milik Gereja Toraja. Namun, para pengurus keuangan Gereja Toraja ABC kurang familiar dengan pedoman tersebut. Bahkan, bendahara umum Gereja Toraja ABC baru mencari pedoman umum tersebut ke pihak Petinggi Gereja ketika peneliti menanyakan perihal tersebut. Perlu dilakukan sosialisasi kepada para pengurus. Menjadi tugas dari Pengurus Pusat (Badan Pekerja) Gereja Toraja dalam merealisasikan hal tersebut. Sehingga Komunikasi dan Informasi dalam hal penyusunan laporan keuangan Gereja Toraja belum berjalan dengan baik padahal sudah ada pedomannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek mengkomunikasikan informasi termasuk di dalamnya tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal untuk mendukung fungsi pengendalian internal belum berjalan dengan optimal.

Dalam pengkomunikasian dengan pihak luar, maka Gereja Toraja ABC sebagai Gereja Lokal dapat mengkomunikasikan permasalahan tersebut pada tingkat Klasis (Petinggi Regional) maupun Sinode (Petinggi Pusat). Namun, karena kebijakan desentralisasi maka Majelis Jemaat dan Pengurus Gereja Toraja ABC merasa bahwa setiap kendala lebih baik langsung diselesaikan dan dibahas secara internal agar dapat segera terselesaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek mengkomunikasikan persoalan pengendalian internal kepada pihak luar belum berjalan dengan optimal.

Monitoring

Gereja Toraja ABC melakukan pemantauan dengan mengevaluasi pelaksanaan PKA dan laporan keuangan. Pelaporan keuangan dievaluasi oleh Majelis Jemaat, terutama diwakili oleh Komisi Verifikasi. Namun, intensitas evaluasi masih minim karena hanya dilakukan pada setiap

tahun dan saat pergantian pengurus (tiga tahun sekali). Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek pemilihan, pengembangan, dan pelaksanaan evaluasi untuk memastikan fungsi dari tiap-tiap komponen pengendalian internal belum berjalan dengan optimal.

Majelis Jemaat mengevaluasi kinerja kepengurusan dengan mempertimbangkan hasil dari rapat majelis atas pelaksanaan program kerja maupun seluruh kegiatan gerejawi lainnya dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini agar para pengurus dalam satu periode dapat senantiasa dievaluasi kinerjanya selama menjalankan tugasnya dapat terus diperbaiki. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan kebijakan di tahun maupun periode berikutnya sebagai langkah perbaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek pelaksanaan evaluasi dan penyampaian kekurangan pengendalian internal kepada pihak yang berhubungan dengan pembenaran tindakan seperti manajer senior dan direksi telah berjalan dengan baik.

Dari analisis dan pembahasan di atas, diketahui bahwa penerapan pengendalian internal tidak sepenuhnya dapat berjalan optimal. Diantara tujuh belas asas dalam komponen pengendalian internal COSO IC-IF, hanya lima asas yang telah berjalan dengan baik. Dua belas asas lainnya belum berjalan dengan optimal. Semua asas dari komponen yang tidak berjalan dengan optimal adalah aktivitas pengendalian serta informasi dan komunikasi. Sementara komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan beberapa dasarnya telah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya unsur kepercayaan lebih jemaat terhadap Pengurus Keuangan Gereja. Tugas penyusunan laporan keuangan dipandang sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Pengurus Keuangan gereja selaku *steward* bekerja sesuai dengan tujuan organisasi dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi, bahkan menyelaraskan kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi. Hal ini juga terlihat dari wawancara dengan Pengurus Keuangan Gereja Toraja ABC yang menyatakan bahwa

mereka menjalankan tugasnya semata-mata untuk Tuhan dan Gereja.

SIMPULAN

Gereja merupakan salah satu lembaga keagamaan yang termasuk organisasi nirlaba yang memperoleh dana untuk kegiatan operasionalnya dari persembahan dan sumbangan yang berasal dari jemaatnya maupun dari pihak luar. Hal ini tidak berarti Gereja tidak perlu transparan dalam hal pengelolaan keuangannya, tapi justru perlu melaksanakannya sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan dan jemaatnya.

Penilaian akuntabilitas pelaporan keuangan oleh bendahara Gereja Toraja sebagai aktor dan hubungannya dengan jemaat sebagai forum menunjukkan bahwa tahapan akuntabilitas tidak berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan adanya benturan dengan pandangan bahwa Gereja adalah tempat yang sakral dan suci sehingga penyimpangan laporan keuangan dipandang sangat kecil kemungkinan terjadinya. Tahapan akuntabilitas *Debating*, dan *Judging* tidak berjalan dengan optimal. Hanya tahapan *Informing about Conduct* yang berjalan dengan baik, walaupun masih memerlukan perbaikan peningkatan penyajian informasi. Pemahaman para Pengurus Keuangan Gereja yang kurang memadai dimaklumi oleh jemaat. Meskipun ruang untuk melakukan proses *Debating* dan *Judging* tidak dibatasi, tetapi jemaat justru cenderung tidak mempertanyakan laporan keuangan, karena memaklumi keterbatasan dari pengurus keuangan Gereja. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas dalam pelaporan keuangan Gereja Toraja yang masih rendah, karena kurangnya komunikasi antara aktor dan forum sesuai dengan *Accountability Cube*. Penerapan pengendalian internal Gereja Toraja ABC juga masih kurang optimal berdasarkan komponen-komponen kerangka kerja COSO IC-IF. Hal yang perlu lebih diperhatikan dalam pengendalian internal Gereja Toraja ABC adalah komponen aktivitas pengendalian serta informasi dan komunikasi. Selain itu, beberapa aspek dalam

komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan juga perlu diperbaiki.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dan penerapan pengendalian internal pelaporan keuangan saling berkaitan. Kurang optimalnya penerapan pengendalian internal sejalan dengan pelaksanaan akuntabilitas pelaporan keuangan yang juga kurang optimal. Oleh karena itu, Gereja Toraja perlu memperbaiki pengendalian internalnya agar mendukung peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan. Pengendalian internal membantu organisasi dalam menyajikan laporan keuangan yang terpercaya, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan lebih baik. Dengan berjalannya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik, maka kepercayaan Jemaat Gereja Toraja ABC dapat meningkat karena informasi yang disajikan terpercaya. Dengan demikian, Gereja Toraja ABC memiliki tata kelola sumber daya yang lebih baik dengan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel di masa mendatang agar dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Tuhan maupun kepada para jemaatnya. Organisasi nirlaba keagamaan seperti gereja memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan organisasi yang berorientasi pada laba. Pelaporan keuangan gereja sebagai lembaga keagamaan tidak dapat dilepaskan dari peran sosial yang melekat dalam bentuk religiusnya. Kesukarelaan dan semangat pelayanan menjadi pendorong bagi para pengurusnya dalam menjalankan tugasnya. Pengurus Keuangan Gereja selaku *steward* pun memprioritaskan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Pengelolaan dan pelaporan keuangan dilakukan sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan dan Gereja sehingga itikad baik ditunjukkan melalui pelaporan keuangan.

Keterbatasan dan kekurangan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan *single unit analysis* agar akuntabilitas pengelolaan keuangan

dan pengendalian internal di Gereja Toraja dalam satu sinode dapat tergambarkan dengan lebih baik.

- b. Lingkup penelitian hanya terbatas pada akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian internal Gereja Lokal. Akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam penelitian ini lebih berfokus pada pelaporan keuangan yang dipublikasikan kepada Jemaat setiap ibadah hari minggu.
- c. Terbatasnya jumlah responden yang diwawancarai, yaitu Bendahara Umum Gereja, kasir Gereja, Majelis Jemaat, dan Jemaat umum.

Bagi unit analisis disarankan agar bagan struktur kepengurusan dan pemisahan tugas tiga fungsi keuangan perlu dimasukkan dan dijelaskan dalam isi Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Harta Milik Gereja Toraja. Kemudian, Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Harta Milik Gereja Toraja disosialisasikan dengan baik kepada Gereja-Gereja Lokal terutama Gereja Toraja ABC sehingga sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Gereja menjadi lebih baik. Namun, sebelumnya perlu diperbaiki terlebih dahulu agar sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dapat menjadi lebih baik. Dengan Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Harta Milik Gereja Toraja yang baik, maka setiap adanya pergantian pengurus mereka tetap mempunyai acuan dan arahan dalam mengelola keuangan Gereja. Sebaiknya, dilakukan pelatihan atau seminar mengenai penyusunan laporan keuangan untuk meningkatkan kemampuan pengurus keuangan Gereja dan dapat mendorong jemaat agar lebih peduli dan paham akan laporan keuangan yang akuntabel. Dengan begitu, diharapkan komunikasi antara pengurus keuangan, majelis jemaat, dan jemaat umum pun dapat ditingkatkan. Sehingga tahapan akuntabilitas dapat berjalan dengan lebih optimal di masa yang akan datang.

Sebaiknya menggunakan aplikasi akuntansi sehingga kesalahan penginputan, perhitungan, dan kesalahan lainnya yang rentan terjadi di *Microsoft Excel* dapat

diminimalisir. Namun, karena pengurus keuangan tidak berlatar belakang akuntansi atau keuangan, maka perlu mengikuti pelatihan dalam menggunakan aplikasi akuntansi tersebut. Dalam implementasi aplikasi akuntansi juga perlu terlebih dahulu disusun bagan akun (*chart of account*). Bagan akun tersebut juga sebaiknya disertai dengan petunjuk dan penjelasan mengenai cara pencatatan dan transaksi apa saja yang tercatat dalam tiap akun. Bendahara yang mencapai tiga orang semestinya dapat dikurangi dan dijadikan pengurus keuangan bagian lain (salah satu bendahara menjadi petugas pembukuan) agar pemisahan tugas menjadi lebih baik dan kemungkinan terjadinya kecurangan dapat diminimalisir. Jika dana yang dimiliki oleh Gereja Toraja ABC mencukupi, sebaiknya dipekerjakan staf khusus sebagai pegawai untuk mengurus keuangan Gereja Toraja ABC. Kinerja dari staf tersebut pun dapat diukur dengan metode penilaian kinerja (*Key Performance Index*) sehingga dapat ditentukan *sanction* atas kinerja staf tersebut. Sehingga, di masa mendatang jemaat Gereja Toraja ABC dapat lebih terdorong untuk menilai dan memeriksa laporan keuangan.

Gereja Toraja ABC perlu mengikuti arahan dan petunjuk dari Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Harta Milik Gereja Toraja dengan lebih baik lagi. Sosialisasi mengenai Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Harta Milik Gereja Toraja perlu ditingkatkan baik kepada para pengurus keuangan dan majelis jemaat agar dapat sama-sama tahu bagaimana pengelolaan keuangan sesuai arahan Pengurus pusat. Meningkatkan intensitas evaluasi atas kinerja para pengurus, terutama pengurus keuangan. Setidaknya evaluasi atas kinerja dilakukan setiap tiga bulan sekali. Hal ini agar para pengurus dalam satu periode dapat senantiasa dievaluasi kinerjanya selama menjalankan tugasnya. Selama satu periode tersebut, kinerjanya dapat terus diperbaiki, karena mengetahui apa saja kekurangannya. Dengan demikian, para pengurus keuangan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik sesuai dengan fungsinya.

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian *stewardship theory* pada pelaku (*person*) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan akuntabilitas dan penerapan pengendalian internal pelaporan keuangan sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan dan Gereja. Kemudian, dapat pula menggunakan sudut pandang *fraud theory* (*fraud triangle* atau *fraud diamond*) dalam mengevaluasi kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan oleh para pengurus keuangan karena berbagai faktor dan alasan yang mendasari tindakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Romney, M.B., & Steinbart P. J. (2017). *Accounting Information Systems 14th edition*. USA: Pearson Education, Inc.
- Toraja, Gereja (2016). Buku Tata Gereja Toraja.

Jurnal

- Bigoni, M., Gagliardo, E. D., & Funnell, W. (2013). Rethinking the sacred and secular divide: Accounting and accountability practices in the Diocese of Ferrara (1431-1457). *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(4), 567–594. <https://doi.org/10.1108/09513571311327462>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: a conceptual framework. *E.L.J.* 2007, 13(4), 447-468. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=25317544&site=ehost-live>
- Brandsma, Gijs Jan & Schillemans, Thomas. (2012). *The Accountability Cube: Measuring Accountability*. *Journal of Public Administration Research and Theory*
- Committee of Sponsoring Organizations (COSO). 2013. *Internal Control – Integrated Framework*.

- Duncan John B., Flesher Dale L., & Stocks, Morris H. (1999). *Internal Control Systems in US Churches: An Examination of The Effects of Church Size and Denomination on Systems of Internal Control*. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 12 (2), 142–164.
<https://doi.org/10.1108/09513579910270084>.
- Furqan, Ridho Al. 2017. *Implementasi Business Process Fraud Risk Assessment Untuk Meminimalisir Risiko Kecurangan Studi Kasus Pada PT. TI*. Tesis. Jakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Ginting, Debora Agusmasnita 2014, *Akuntabilitas Keuangan Dalam Organisasi Gereja Protestan: Studi Fenomenologi Pada Gereja GBKP di Perumnas Simalingkar*, Skripsi S1, <http://digilib.unimed.ac.id/>.
- Hartanti, Ceicilia Astri. (2017). Analisis dan Perancangan Pengendalian Internal Pada Siklus Pendapatan Entitas Nirlaba (Studi Kasus Pada Yayasan ABC). Tesis. Jakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Jeffrey, C. (2008). *Internal Control at Private Companies and Nonprofits*. *The CPA Journal*, Volume 78 (9), 52-54
<https://search.proquest.com/docview/212274426?accountid=17242>.
- Laughlin, R.C. (1998). *Accounting in its social context: an analysis of the accounting systems of the Church of England*. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 1 (2), 19–42.
- Purnama, Yudhi. 2016. *Evaluasi Proses Pertanggung Jawab Pelaporan Dana Hibah di Organisasi Nirlaba Internasional: Studi Kasus pada Organisasi XYZ*. Tesis. Jakarta. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Raya, Maria Kurniati Gedi. (2017). Evaluasi Implementasi Pelaporan Keuangan Sebagai Bentuk Akuntabilitas Organisasi Keagamaan (Studi Kasus: Gereja Katolik Paroki St. Paulus Miki Salatiga). *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol. 1 No. 1, January 2017, pp. 01-21
- Stake, R. (1995). *The Art of Case Study Research*. London: Sage Publication.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susetyo, B. (2009). *Menuju Teori Stewardship Manajemen*. *Jurnal Permana*, 1, 53–59.
- Teketel, Tsegahiwot dan Berhanu, Zelalem. (2009). *Internal Control in Swedish small and medium size enterprises*. Master Thesis. Umeå School of Business - USBE Masters in Business Administration.
- Yin, R. (2003). *Case study research: Design and methods (3rd edition)*. California: Thousands Oaks.

Berita

- BBC. 2018. *Pengurus gereja Singapura yang 'korup' ditangkap ketika mau 'melarikan diri'*
<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-43154207> (diakses pada 09.22 WIB, 13 Mei 2019).
- Jawapos.com. (2019). *Korupsi Dana Hibah Pura Dalem Kebon, Klian Pura Diganjar 1 Tahun Bui*.
<https://radarbali.jawapos.com/read/2019/12/10/169555/korupsi-dana-hibah-pura-dalem-kebon-klian-pura-diganjar-1-tahun-bui>
- Kumparan.com. (2018). *Korupsi Dana Infaq, Takmir Masjid Pakuwon Mall Surabaya Dihukum 2,5 Tahun*.
<https://kumparan.com/ngopibareng/korupsi-dana-infaq-takmir-masjid-pakuwon-mall-surabaya-dihukum-2-5-tahun-27431110790550412>.